

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RENCANA
TATA RUANG PADA PEMBANGUNAN USAHA PARIWISATA
(Studi Pembangunan Taman Rekreasi di Dusun Air Kulah Desa Pulau
Bukit)**

Oleh
Zidanni
NIM. 170574201071

Abstrak

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian terpenting karena keberadaannya memberi arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi pidana pada suatu tindakan pidana. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pariwisata yang terjadi di Dusun Air Kulah Desa Pulau Bukit Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga terhadap pembangunan yang di rencanakan oleh PT.Berkah Pulau Lingga (BPL) terdapat pelanggaran dalam proses pembangunan usaha pariwisata yang mengakibatkan rusaknya daya tarik wisata serta merubah bentuk kontur tanah dengan melakukan pematangan lahan (*cut and fill*), menimbun, dan membawa tanah hasil urug ke tempat lain sebagai bentuk pengrusakan terhadap daya tarik wisata pada usaha pariwisata yang di bangun hal ini bertentangan dengan rencana tata ruang kabupaten lingga pasal 56 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 2 tahun 2013 tentang Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011 – 2031. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang pada pembangunan usaha pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang pada pembangunan usaha pariwisata di Dusun Air Kulah Desa Pulau Bukit, tidak terdapat penerapan hukum secara maksimal dan dapat di pahami masyarakat dan aparat penegak hukum masih lemah dalam pengawasan sehingga terlihat dengan jelas pembangunan usaha pariwisata yang ada dengan izin yang di dapatkan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah Kabupaten Lingga. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga agar dapat menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran yang ada sebagai pelaksanaan diri tugas dan fungsi pemerintah dalam mengawasi.

Kata Kunci : Penerapan, Pariwisata, Sanksi Pidana

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF
SPATIAL PLANNING IN TOURISM BUSINESS DEVELOPMENT
(Study on the Construction of a Recreational Park in Air Kulah Hamlet, Pulau
Bukit Village)**

Oleh

Zidanni
NIM. 170574201071

Abstract

The application of criminal sanctions is the most important part because its existence provides direction and consideration regarding what should be used as criminal sanctions for a criminal act. Tourism is a variety of tourism activities and is supported by various facilities and services provided by the community, business people, government and local government. The development of tourism that occurred in Dusun Air Kulah, Pulau Bukit Village, Katang Bidare District, Lingga Regency, regarding the development planned by PT. Berkah Pulau Lingga (BPL), there were violations in the process of developing tourism businesses that resulted in damage to tourist attractions and changed the shape of the land contour by carrying out land preparation (cut and fill), stockpiling, and carrying the landfill to another place as a form of destruction of tourist attractions in tourism businesses that were built. This is contrary to the Lingga Regency spatial plan, article 56 paragraph 10 of Lingga Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning the Lingga Regency Spatial Planning Plan for 2011-2031. The formulation of the problem in this study is how to apply criminal sanctions to violations of spatial plans in the development of tourism businesses. The purpose of this study is to determine how to apply criminal sanctions to violations committed. The research method used is the empirical normative research method. The results of this study are the application of criminal sanctions for violations of spatial planning in the development of tourism businesses in Dusun Air Kulah, Pulau Bukit Village, there is no maximum application of the law and can be understood by the community and law enforcement officers are still weak in supervision so that it is clearly visible that the development of tourism businesses that exist with permits obtained but do not comply with the spatial planning of the Lingga Regency government. The suggestion from this study is that the Lingga Regency Government is expected to be able to follow up on existing violations as the implementation of the government's duties and functions in supervising.

Keywords: Implementation, Tourism, Criminal Sanction